

**KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ZULIATI

NIM. 02623/ 2008

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

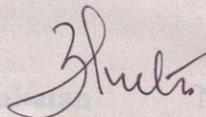
KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI SUMATERA BARAT

Nama : Zuliati
TM/NIM : 2008/02623
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

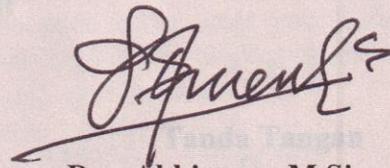
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



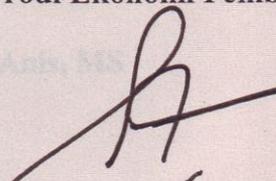
Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S.
NIP. 19610502 198601 2 001

Pembimbing II



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

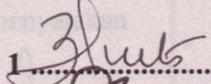
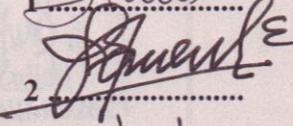
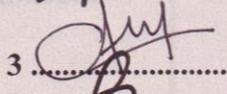
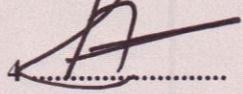
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Padang*

**KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA BARAT**

Nama : Zuliati
TM/NIM : 2008/02623
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	1. 
2. Sekretaris	: Drs. Akhirmen, M.Si	2. 
3. Anggota	: Ariusni, SE. M.Si	3. 
4. Anggota	: Drs. H. Ali Anis, MS	4. 

SURAT PERNYATAAN
(Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuliati
NIM/BP : 02623/2008
Tempat/ Tgl Lahir : Bisati, 29 Juli 1990
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendeawasih gg Gurami No 12 Air Tawar Barat
No. HP/Telp. : 085667626230
Judul Skripsi : Kausalitas Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat

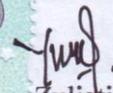
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2013

Yang menyatakan




Zuliati
NIM.02623

ABSTRAK

Zuliati 2008/02623 : Kausalitas Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara ketimpangan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada pengaruh antar variabel. Jenis data dalam penelitian ini adalah *pool time series* dari tahun 2009-2011 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif dan induktif. Analisis induktif terdiri dari Uji Stationeritas Data, Uji Kointegrasi, Uji Kausalitas Granger dan uji F dengan $\alpha = 0,05$.

Hasil Uji Unit Root menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan telah stationer pada *1st difference*. Hasil *Cointegration Test* menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Dengan nilai *Trace Statistik* lebih besar dari *Critical Value* yaitu, $33,97152 > 15,49471$ dengan probabilitas sebesar 0.000 pada $\alpha = 5\%$. Dan *Granger Causality Test* menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara ketimpangan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan yaitu ketimpangan pendidikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan $F_{\text{statistik}}$ yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} yakni $5,44999 > 3,165$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,0178 pada $\alpha = 0,05$ sedangkan ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan dengan $F_{\text{statistik}}$ yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan F_{tabel} yakni $1,63224 < 3,165$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,2306 pada $\alpha = 0,05$. Dari hasil penelitian ini maka disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan masalah pendidikan agar adanya pemerataan pendidikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) serta adanya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Kausalitas Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera barat”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S dan Ibu Ariusni, M.Si selaku tim pembimbing dan Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan

skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.

6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta kedua kakak terkasih yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Modal Manusia (<i>Human Capital</i>).....	15
2. Pendidikan Sebagai Modal Manusia.....	17
a. Pengertian Pendidikan.....	17
b. Pengaruh Investasi Pada Pendidikan Terhadap Pendapatan	19
c. Hubungan Ketimpangan Pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan	21
3. Distribusi Pendapatan.....	23
a. Pengertian Pendapatan	23
b. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan	24
c. Jenis Distribusi Pendapatan.....	28

d. Metode Menghitung Pendapatan.....	30
B. Penelitian yang Relevan.....	33
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Jenis Data dan Sumber Data	37
D. Variabel Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Definisi Operasional	38
G. Teknik Analisis Data	39
1. Analisis Deskriptif	39
2. Analisis Ketimpangan Pendidikan dan Pendapatan.....	40
3. Analisis Induktif	41
a. Uji Stasioneritas Data (Unit Root test).....	41
b. Uji Kointegrasi	42
c. Uji Kausalitas Granger	42
d. Pengujian	43

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	45
a. Letak Geografis Indonesia.....	45
b. Keadaan Penduduk	46
2. Deskripsi Variabel	48
a. Ketimpangan Pendidikan kabupaten/ kota di Sumatera Barat.....	49

b. Ketimpangan Pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat	52
3. Analisis Induktif	54
a. Uji Stasioneritas Data (Unit Root test).....	54
b. Uji Kointegrasi	56
c. Uji Kausalitas Granger	57
B. Pembahasan	
1. Hubungan ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat	58
2. Hubungan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan kabupaten/ kota di Sumatera Barat	62
 BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2009 – 2011	3
2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/ Kota dan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2009-2011	5
3. Persentase Penduduk Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2009-2011.....	9
4. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-20114	9
5. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat tahun 2009-2011	52
6. Hasil pengujian ADF pendidikan dengan Intercept 1 st Difference.....	54
7. Hasil pengujian ADF pendapatan dengan Intercept 1st Difference	55
8. Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen	56
9. Hasil Uji Granger Causality	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Lorenz	25
2. Kurva Indek	26
3. Kerangka konseptual Kausalias Ketimpangan Pandidikan dan Ketimpanan Pandapatan Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Persentase penduduk Sumatera Barat berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut kabupaten/ kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2009-2011	69
2. Tabulasi data ketimpangan pendidikan	71
3. Tabulasi data ketimpangan pendapatan	72
4. Rasio Gini pendidikan kabupaten/ kota di Sumatera Barat tahun 2009-2011	73
5. Rasio Gini pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat tahun 2009-2011	102
6. Uji Unit Root.....	131
7. Uji Kointegrasi	132
8. Uji Kausalitas Granger	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (*resources*), baik sumber daya alam (*natural resources*) maupun sumber daya manusia (*human resources*). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang bersangkutan. Peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan ekonomi global dan juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang cepat harus ditunjang dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola perekonomian sehingga stabilitas dan perkembangannya dapat terjaga secara seksama. Kesiapan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah).

Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada pendidikan masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan kerja manusia nantinya akan meningkatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidup manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan produktivitas, pengalokasian waktu dan sumber daya yang lain, serta peningkatan kepuasan dan konsumsi baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Masalah yang dihadapi negara berkembang saat ini adalah tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi, dan terjadinya ketimpangan-ketimpangan serta meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat menimbulkan aneka permasalahan yang serius bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cepat jika tidak diimbangi dengan perbaikan tingkat pendidikan yang cukup maka akan menimbulkan berbagai masalah ketimpangan diantaranya akan menyebabkan ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berikut adalah data tentang Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2011.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut kabupaten/ kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2011

Daerah Kab / Kota	Jumlah Penduduk (orang)				
	2009	2010	Pert(%)	2011	Pert (%)
Mentawai	68.964	76.173	10,45	77.376	1,,58
Pesisir selatan	448.488	429.246	-4,29	433.632	1,02
Kab. Solok	359.819	348.566	-3,13	351.976	0,98
Sijunjung	206.982	201.823	-0,25	204.738	1,44
Tanah Datar	336.604	338.494	0,06	340.893	0,71
Padang Pariaman	389.735	391.056	0,03	394.143	0,79
Agam	431.153	454.853	0,55	459.487	1,02
Lima Puluh Kota	33.391	348.555	0,44	352.396	1,10
Pasaman	261.579	253.299	-3,16	256.226	1,16
Solok Selatan	133.804	144.281	0,78	146.422	1,48
Dhamasraya	186.354	191.422	0,27	195.103	1,92
Pasaman Barat	338.567	365.129	0,78	371.000	1,61
Padang	875.548	833.562	-0,48	844.316	1,29
Solok	59.837	59.496	-0,07	60.301	1,35
Sawahlunto	54.685	56.866	0,40	57.493	1,10
Padang Panjang	56.491	47.008	-1,68	47.619	1,30
Bukittinggi	107.805	111.312	0,33	112.912	1,44
Payakumbuh	106.911	116.825	0,93	118.435	1,38
Pariaman	70.726	79.043	1,18	79.992	1,20

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka 2009-2011

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada umumnya jumlah penduduk di kabupaten/ kota di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 peningkatan jumlah penduduk paling tinggi terdapat pada kabupaten kepulauan Mentawai dari 68.964 orang pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 76.173 orang pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 10,45%. Kota Pariaman juga mengalami peningkatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 70.726 orang pada

tahun 2009 dan meningkat menjadi 79.043 orang pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18%. Ada beberapa kabupaten dan kota pada tahun 2009 dan 2010 di Sumatera Barat yang mengalami penurunan. Penurunan paling tinggi terjadi di kabupaten Pesisir Selatan dari 448.488 orang pada tahun 2009 menurun menjadi 429.426 orang pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan sebesar -4,29% .

Pada tahun 2011 kabupaten Dhamasraya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Barat yaitu pada tahun 2010 sebanyak 191.422 orang dan tahun 2011 meningkat menjadi 195.103 orang dengan laju pertumbuhan menurun sebesar 1,92 %. Sedangkan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan paling sedikit terjadi di kabupaten Tanah Datar yaitu tahun 2010 sebanyak 338.494 orang dan meningkat menjadi 340.893 orang pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhannya mencapai 0,71 %.

Pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya jumlah penduduk kabupaten/ kota di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk jika tidak dibarengi dengan usaha-usaha pembangunan yang baik maka akan menyebabkan berbagai ketimpangan diantaranya ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan.

Berikut adalah tabel Jumlah Penduduk Sumatera Barat berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut dan Pendidikan tertinggi ditamatkan:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009-2011

Daerah Kab/kota Tahun 2009	Penduduk Sumatera Barat Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten /Kota dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (2009 -2011)					
	Tdk/Blm Pernah sekolah	Tdk/Blm tmat SD	SD	SMP	SMTA	Diploma I/II/IIUnive rsitas I/II/II
Mentawai	2.130	10.974	8.586	5.664	3.341	879
Pesisir selatan	3.348	56.488	37.533	28.285	35.496	9.386
Kab. Solok	2.037	45.068	42.931	31.182	30.172	9.173
Sijunjung	5.159	24.714	21.808	18.828	15.420	5.193
Tanah Datar	2.534	35.566	34.585	34.211	34.489	12.518
Padang Pariaman	7.311	56.906	28.720	29.139	30.984	8.104
Agam	1.411	51.734	41.426	41.560	47.375	14.902
Lima Puluh Kota	1.273	39.272	41.543	37.612	35.945	6.108
Pasaman	375	31.339	24.835	22.828	19.343	6.445
Solok Selatan	1.953	16.039	13.505	10.575	9.813	3.002
Dharmasraya	1.977	19.313	21.494	16.971	12.467	3.622
Pasaman Barat	1.221	38.608	38.512	31.120	25.256	5.151
Padang	555	25.649	29.612	65.063	126.385	49.939
Solok	332	3.039	2.519	5.866	9.185	3.903
Sawahlunto	152	2.681	4.118	4.261	6.171	2.577
Padang Panjang	75	2.533	3.139	5.060	8.143	4.141
Bukittinggi	130	4.223	6.278	12.143	19.738	7.851
Payakumbuh	379	6.401	8.096	10.126	17.362	7.180
Pariaman	302	4.863	4.240	6.362	10.054	3.939
Tahun 2010						
Mentawai	2.145	12.475	11.116	5.198	4.295	1.224
Pesisir selatan	1.584	44.777	29.868	35.510	33.228	13.839
Kab. Solok	1.320	53.348	37.172	33.345	27.171	9.344
Sijunjung	1.869	23.022	18.975	17.092	15.483	6.582
Tanah Datar	749	32.896	35.114	35.296	39.613	10.280
Padang Pariaman	6.451	52.433	29.363	31.505	30.282	9.128
Agam	2.124	51.369	45.991	36.642	47.440	15.116
Lima Puluh Kota	970	40.270	40.318	44.064	34.037	8.904
Pasaman	996	23.133	29.888	23.874	17.938	9.731
Solok Selatan	1.101	17.707	15.252	12.452	12.319	4.280
Dharmasraya	1.975	21.474	20.560	22.113	15.887	5.410
Pasaman Barat	2.361	38.915	43.465	33.671	31.386	8.819
Padang	1.464	20.699	34.117	58.665	131.394	58.451

Solok	45	4.049	1.962	5.377	8.171	3.708
Sawahlunto	-	3.424	5.040	4.877	7.859	4.214
Padang Panjang	27	2.428	1.929	4.661	8.627	3.298
Bukittinggi	-	2.205	6.207	9.706	19.753	8.929
Payakumbuh	154	5.979	8.476	10.335	19.187	9.061
Pariaman	80	3.863	4.166	6.946	12.158	4.719
Tahun 2011						
Mentawai	1.915	9.285	10.825	3.607	3.939	1.250
Pesisir selatan	6.913	28.483	38.622	38.933	48.001	24.422
Kab. Solok	1.974	38.028	33.630	28.410	36.957	9.796
Sijunjung	1.165	22.273	19.760	16.461	18.031	8.984
Tanah Datar	1.284	28.195	40.462	27.720	36.585	14.842
Padang Pariaman	2.867	39.528	31.782	36.925	36.257	13.243
Agam	1.853	52.148	38.236	42.555	44.454	13.116
Lima Puluh Kota	1.367	36.228	44.705	35.114	27.730	9.235
Pasaman	2.331	21.586	38.569	18.144	15.792	8.498
Solok Selatan	35	15.528	11.487	10.899	17.516	6.088
Dharmasraya	2.485	14.410	25.055	21.648	16.113	5.066
Pasaman Barat	1.107	37.056	45.295	33.123	26.369	7.426
Padang	3.238	30.391	39.258	71.672	158.124	60.976
Solok	150	2.134	3.552	4.932	10.168	3.704
Sawahlunto	67	3.386	5.454	5.084	8.149	2.940
Padang Panjang	-	1.163	1.878	4.076	7.705	4.482
Bukittinggi	357	4.245	6.284	9.886	18.438	6.978
Payakumbuh	463	6.397	10.158	11.058	16.127	5.739
Pariaman	457	4.077	5.050	7.247	10.794	5.126

Sumber : keadaan tenaga kerja 2009-2011

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk kabupaten/ kota di Sumatera Barat relatif rendah karena masih banyak penduduk yang bekerja yang belum pernah sekolah atau belum tamat Sekolah Dasar. Pada tahun 2009 penduduk yang bekerja yang belum pernah sekolah paling banyak terdapat di kabupaten kepulauan Mentawai 2.130 orang dan kota Padang Panjang merupakan penduduk yang paling sedikit jumlah yang penduduknya bekerja yang belum pernah sekolah. Dapat dilihat bahwa tingkat

pendidikan di kabupaten kepulauan mentawai masih rendah karena penduduk yang bekerja yang pendidikannya diploma/ universitas hanya sebanyak 879 orang dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan diploma/ universitas yang paling banyak tahun 2009 terdapat di kota Padang.

Berdasarkan Tabel 2 Dapat dilihat di kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 penduduk yang bekerja yang belum pernah sekolah mencapai 6.451 orang, tingkat pendidikannya yang belum menamatkan Sekolah Dasar (SD) mencapai 52.433 orang, sedangkan diploma dan universitas hanya 9.128 orang. Sementara di kota Sawahlunto dan kota Bukittinggi pada tahun 2010 tidak ada lagi masyarakat yang bekerja yang belum pernah sekolah.

Penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan diploma dan universitas yang paling banyak pada tahun 2010 dan 2011 terdapat di kota Padang yaitu sebanyak 58.451 orang pada tahun 2010 dan 60.976 orang pada tahun 2011. Sedang penduduk yang bekerja pada tingkat diploma dan Universitas yang paling sedikit terdapat di kabupaten kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 1.224 orang pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 1.250 orang.

Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat yang bekerja di kabupaten/ kota di Sumatera Barat adalah masyarakat yang pendidikannya Tamatan SMTA (Sekolah Menengah Atas). Di kota Padang masyarakat yang bekerja pada tamatan SMTA mencapai 158.124 orang pada tahun 2011 padahal pada tahun 2010 hanya sebanyak 131.394 orang.

Sedangkan kabupaten kepulauan Mentawai pada tahun 2010 yang berkerja yang pendidikan tamat SMTA sebanyak 4.295 orang dan pada tahun 2011 menurun menjadi 3.939 orang.

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat berbeda-beda disetiap kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Ada beberapa kabupaten/ kota di Sumatera Barat yang pendidikan masyarakatnya sudah tinggi sehingga hanya sedikit masyarakat yang bekerja pada tingkat pendidikan yang rendah dan sebaliknya ada juga beberapa kabupaten/ kota yang pendidikan masih rendah sehingga masih banyak masyarakat yang bekerja pada tingkat pendidikan yang masih rendah. Sehingga terjadi ketimpangan pendidikan di antara kabupaten/ kota di Sumatera Barat yang memungkinkan akan terjadi juga ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Pendapatan penduduk di kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat dilihat dari jumlah pengeluaran perkapita perbulan. Berikut data tentang persentase penduduk kabupaten/ kota di Sumatera Barat dan Pengeluaran Perkapita sebulan tahun 2009-2011 dalam tabel 3 :

Tabel 3
 Persentase Penduduk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan Golongan
 Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2009-2011

Daerah Kab/kota Tahun 2009	Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2010-2011					
	< dari Rp. 100.000	Rp. 100.00 - 149.000	Rp. 150.000 -199.000	Rp. 200.000 - 299.000	Rp. 300.000 - 499.000	> dari Rp. 500.000
Mentawai	1,40	15,80	17,70	53,30	21,30	8,50
Pesisir selatan	-	1,00	4,40	30,40	51,30	13,00
Kab. Solok	-	0,30	4,60	25,50	41,00	28,60
Sijunjung	-	0,80	5,20	25,00	40,40	28,60
Tanah Datar	-	0,30	4,00	28,60	42,50	24,60
Padang Pariaman	-	1,00	4,10	23,50	40,60	30,70
Agam	-	1,60	8,10	33,00	41,10	16,20
Lima Puluh Kota	-	-	4,50	30,20	46,60	18,60
Pasaman	-	1,90	9,70	38,70	33,60	16,10
Solok Selatan	-	2,50	10,10	33,40	37,10	16,80
Dharmasraya	0,10	1,30	4,20	22,50	38,60	33,20
Pasaman Barat	-	0,40	3,80	29,10	44,40	22,30
Padang	-	0,30	0,60	9,40	38,50	51,20
Solok	-	0,50	1,50	11,60	37,80	48,50
Sawahlunto	-	0,30	2,70	18,80	40,70	37,40
Padang Panjang	-	-	1,00	9,60	43,80	45,60
Bukittinggi	-	-	1,90	8,00	34,20	55,90
Payakumbuh	-	0,10	0,90	8,80	39,80	50,40
Pariaman	-	0,70	1,20	11,50	37,10	49,50
Tahun 2010						
Mentawai	2,61	10,86	9,37	18,18	37,70	21,96
Pesisir selatan	-	0,86	2,53	13,84	51,87	30,90
Kab. Solok	-	0,25	2,22	17,19	46,72	33,61
Sijunjung	-	1,75	4,22	16,73	45,74	31,55
Tanah Datar	-	0,24	1,16	19,10	48,92	30,58
Padang Pariaman	-	0,25	1,35	18,68	47,94	31,78
Agam	-	0,54	4,25	29,03	40,61	25,57
Lima Puluh Kota	-	0,31	3,61	20,77	51,37	23,94
Pasaman	-	0,79	3,81	29,74	44,55	21,11
Solok Selatan	-	0,41	5,25	29,21	42,56	22,56
Dharmasraya	-	0,40	2,67	15,71	42,92	38,29
Pasaman Barat	-	0,10	1,83	19,65	50,32	28,10
Padang	0,35	0,03	0,53	4,43	26,92	67,74
Solok	-	0,51	0,71	8,28	32,95	57,55
Sawahlunto	-	-	1,76	17,15	36,96	44,31
Padang Panjang	-	-	1,01	12,31	32,68	54,18
Bukittinggi	-	-	0,54	8,11	20,62	70,73
Payakumbuh	-	-	1,10	11,78	40,31	46,59
Pariaman	-	-	1,20	9,86	42,42	46,52

Tahun 2011						
Mentawai	2,10	7,79	15,29	30,76	29,83	14,23
Pesisir selatan	-	0,40	5,13	17,56	46,24	30,67
Kab. Solok	-	-	1,92	15,93	40,06	42,09
Sijunjung	-	0,19	1,29	13,31	37,42	47,79
Tanah Datar	-	-	0,11	10,00	38,67	51,22
Padang Pariaman	-	0,26	0,35	10,75	35,89	52,76
Agam	-	-	1,10	14,92	48,75	35,23
Lima Puluh Kota	-	0,24	2,66	18,34	49,78	28,98
Pasaman	-	1,35	6,97	34,48	37,16	20,03
Solok Selatan	-	-	2,30	18,83	41,03	37,84
Dharmasraya	-	-	0,13	2,72	28,92	68,23
Pasaman Barat	-	0,19	0,82	15,34	42,56	41,08
Padang	-	-	-	3,88	25,62	70,50
Solok	-	-	-	3,75	23,10	73,15
Sawahlunto	-	-	0,52	7,21	24,86	67,41
Padang Panjang	-	0,17	0,45	8,37	18,17	72,85
Bukittinggi	-	-	0,36	0,91	20,11	78,62
Payakumbuh	-	-	-	7,68	40,46	51,86
Pariaman	-	-	0,22	5,25	32,47	62,06

Sumber :BPS, Susenas Propinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita sebulan setiap kabupaten/ kota berbeda-beda. ini mungkin disebabkan oleh pendapatan yang diterima penduduk juga berbeda-beda. Dapat dilihat pada tahun 2009 pengeluaran perkapita sebulan penduduk kurang dari Rp. 100.000 masih terdapat di kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 1,40% dan kabupaten Dharmasraya sebesar 0,10%. Sedangkan pengeluaran perkapita sebulan antara Rp. 100.000- Rp.149.000 persentase paling tinggi masih terdapat di kabupaten Mentawai yaitu sebesar 15,80% dan kabupaten Lima Puluh Kota, kota Padang Panjang serta kota Bukittinggi sudah tidak terdapat lagi pengeluaran perkapita antara Rp. 100.000 – Rp. 149.000. Tingkat pengeluaran perkapita lebih dari Rp. 500.000 terdapat di kota Bukittinggi dengan persentase sebesar 55,90%

dan paling sedikit terdapat di kabupaten kepulauan Mentawai dengan persentasenya sebesar 8,50%.

Pada Tabel 3 dapat dilihat pada tahun 2010 masih ada pengeluaran perkapita penduduk perbulan yang kurang dari Rp. 1.00.000 yaitu kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 2,62% dan kota Padang 0,35%. Pada umumnya dari Rp.300.000 – Rp .499.000 perbulan terus mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita Rp.300.000- Rp. 499.000 pada tahun 2010 paling tinggi terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 51,87% dan paling sedikit terdapat di kota Bukittinggi yaitu 20,62%. Pengeluaran pekapita yang lebih dari Rp. 500.000 paling tinggi terdapat di kota Bukittinggi yaitu sebesar 70,73% dan paling sedikit terdapat di kabupaten Pasaman yaitu 21,11%.

Pada Tabel 3 juga dapat dilihat tahun 2011 yang pengeluaran perkapita penduduk masih yang kurang dari Rp.100.000 hanya terdapat di kabupaten kepulauan Mentawai yaitu sebesar 2,10%. Pengeluaran perkapita lebih dari Rp.500.000 paling tinggi terdapat di kota Bukit tinggi yaitu sebesar 78,62% dan paling sedikit terdapat kabupaten kepulauan mentawai yaitu sebesar 14,23%.

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita penduduk perbulan berbeda-beda. Adanya yang pengeluaran perkapitanya masih rendah dan ada juga pengeluaran yang sudah tinggi. Mungkin hal ini disebabkan oleh pendapatan yang diterima berbeda-beda atau terjadinya

ketimpangan pendapatan antara masyarakat sehingga pengeluarannya berbeda pula.

Tingkat pendapatan diduga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka penghasilan yang diperoleh juga akan tinggi dan Tingkat pendidikan juga diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat pendidikannya. Distribusi pendidikan dapat dilihat dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja dengan pendidikan tinggi yang ditamatkannya.

Pendapatan penduduk tidak selalu merata, bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan tersebut terbagi secara tidak merata (ada yang kecil, sedang dan besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Semakin besar perbedaan pembagian pendapatan regional tersebut berarti semakin besar pula kesenjangan/ketimpangan distribusi pendapatan.

Tingkat pendidikan diduga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima, dimana jika semakin tinggi tingkat pendidikan maka produktivitas kerja penduduk akan meningkat, sehingga pendapatan yang akan diterima juga akan meningkat. Selain itu, pendidikan dapat menambah keterampilan dan produktivitas seseorang sehingga mampu meningkatkan pendapatan seseorang.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diduga akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti rendahnya produktivitas kerja terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Kausalitas Ketimpangan Pendidikan Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara ketimpangan Pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

2. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan dan pihak yang berkepentingan seperti kepada pengambil keputusan khususnya mengenai ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan.
4. Bagi pengembangan ilmu yaitu Ilmu Ekonomi Pembangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Modal Manusia (*Human Capital*)

Menurut Mankiw (2003:27) istilah modal biasanya mengacu pada persediaan peralatan barang dan struktur ekonomi. Namun sebenarnya ada jenis modal lain, yang penampakan atau wujudnya tidak jelas modal fisik, namun sama pentingnya bagi kegiatan produksi di setiap perekonomian, yakni Modal Manusia (*Human Capital*). Modal manusia merupakan akumulasi investasi pada manusia. Salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Sama halnya dengan semua bentuk modal lainnya, pendidikan menuntut pengeluaran sumber daya sampai titik dan waktu tertentu demi meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Investasi dalam pendidikan terikat erat pada orang tertentu, tidak bisa dipindah-pindahkan begitu saja karena melekat pada diri manusia tertentu itulah, maka dari itu modal ini disebut sebagai modal manusia.

Menurut Mankiw (2003:46) pada umumnya rata-rata pekerja yang memiliki lebih banyak modal manusia memperoleh pendapatan lebih tinggi ketimbang pekerja lain yang modal manusianya lebih terbatas.

Menurut Jhingan (2004:415) modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara, termasuk juga

kesehatan. Jhingan menjelaskan bahwa sekarang makin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu “proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara”.

Penanaman modal pada modal manusia (pendidikan) sangatlah penting. kebutuhan investasi pada pembentukan modal manusia di dalam perekonomian terutama di negara terbelakang dan berkembang menjadi penting karena ternyata investasi modal fisik secara besar-besaran ternyata tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan, lantaran sumber manusianya terbelakang.

Pertumbuhan sudah barang tentu dapat juga terjadi melalui pembentukan modal konvensional meskipun tenaga buruh yang ada kurang terampil dan kurang pengetahuan. Tetapi laju pertumbuhan tersebut akan sangat terbatas tanpa adanya faktor modal manusia. Karena itu, modal manusia diperlukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pemerintahan yang semakin penting untuk memperkenalkan sistem baru penggunaan lahan dan metode baru pertanian, untuk membangun peralatan baru komunikasi, untuk melaksanakan industrialisasi, dan untuk membangun sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembaharuan atau proses perubahan dari masyarakat statis atau tradisional, memerlukan sejumlah besar modal manusia strategis.

Menurut Todaro (2003:404) modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa modal manusia merupakan investasi pada manusia. Salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan produktivitas di masa mendatang.

2. Pendidikan Sebagai Modal manusia

a. Pengertian Pendidikan

Menurut Todaro (2003:404) pendidikan merupakan kunci dalam membentuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang produktivitas. Pendidikan dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

Menurut Danim (2003:25) pendidikan pada intinya merupakan proses penyiapan subjek didik menuju manusia masa depan yang bertanggung jawab. Kata “bertanggung jawab” mengandung makna bahwa subjek didik dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam Undang-Undang (UU) RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranan dimasa mendatang.

Menurut Brubacher (dalam Danim, 2003:25), mendefenisikan pendidikan sebagai proses untuk mengembangkan potensi dasar manusia yang berkaitan dengan moral, intelektual, dan jasmaninya untuk mencapai tujuan hidup dalam kerangka sistem sosial.

Di dalam UUD No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyatakan pasal 1 :

- a. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI dan tanggung jawab terhadap tuntutan perbaikan zaman.
- b. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian umum pendidikan adalah usaha sadar yaitu mengembangkan kemampuan manusia secara maksimal sehingga bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungannya.

Menurut Priyono (dalam Hasan, 2007:23), aspek pendidikan merupakan aspek penting lainnya yang sangat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan akan mencerminkan kualitas penduduk suatu Negara. Semakin baik kualitas pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya dalam bekerja. Ini dikarenakan ia akan mudah menyerap inovasi-inovasi dan informasi-informasi baru untuk meningkatkan produktivitasnya.

Jadi latar belakang pendidikan dapat membedakan kaulitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuannya akan bertambah pula, maka hal ini membuat seseorang bernilai lebih dibandingkan orang lain yang mempunyai pendidikan lebih rendah. Untuk mengadakan perubahan yang terarah dan terencana untuk suatu perbaikan, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan memadai sehingga dapat diandalkan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya yang baik dalam meningkatkan pendapatan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan seseorang.

b. Pengaruh Investasi Pada Pendidikan Terhadap Pendapatan

Menurut Tobing (dalam Atmanti, 2005:36) investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politik, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan

ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.

Menurut Danim (2003:26) investasi pada pendidikan merupakan hal yang menguntungkan karena perolehan pendidikan direferensikan sebagai fungsi dari perolehan pendapatan dimasa akan mendatang. Pekerja yang berpendidikan menerima upah atau pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerja yang kurang berpendidikan.

Menurut Simanjuntak, P. (dalam Elfendri, 2001:69) investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai stock manusia. Dimana nilai stock manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai. Para ekonomi mengklasifikasikan bahwa nilai yang diperoleh adalah beberapa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan nilai rasional individu dibandingkan dengan sebelum mengesap pendidikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan proses investasi pendidikan saat sekarang, maka manfaat yang akan diperoleh oleh individu adalah pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan nilai

stock manusia, maka seseorang perlu mengorbankan biaya baik oleh individu maupun masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa investasi pada pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas seseorang yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Produktivitas kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan.

c. Hubungan Ketimpangan Pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro (2003:435) adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan ada mereka yang menyelesaikan seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada mereka yang menyelesaikan sekolah menengah dan universitas. Pendapatan lebih besar dari pendapatan para pekerja yang hanya pendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu. Karena tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Menurut Mankiw (2003:27) tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan kalau dilihat dari sisi penawaran dan permintaannya. Pihak perusahaan selaku permintaan/pembeli tenaga kerja bersedia membayar lebih banyak untuk memperoleh yang pekerja lebih terdidik, karena para pekerja ini memiliki produk marginal yang lebih tinggi. Sedangkan para pekerja selaku penawar/penjual tenaga kerja bersedia menanggung biaya agar lebih terdidik hanya jika tersedia imbalan untuk itu. Selisih pendapatan antara pekerja yang

berpendidikan tinggi dengan yang rendah dapat dipandang sebagai perbedaan pengimbang bagi biaya untuk menjadi terdidik. Pendidikan adalah sebagai modal manusia karena dapat mempengaruhi pendapatan seseorang karena pendidikan membuat seseorang lebih produktif.

Menurut Danim (2003:275) kenaikan atau besaran tingkat pendapatan sejalan dengan tingkat pendidikan. Setiap tahun tambahan pendidikan diperkirakan akan memberikan efek sebesar 5 % sampai 16 % terhadap pendapatan. Orang-orang yang menerima pendidikan dengan kualitas lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan. Perolehan pendidikan secara berkualitas berarti meningkatkan peluang untuk memperoleh pendapatan lebih baik, sebaliknya perolehan pendidikan dibawah rata-rata akan menyebabkan kekurangan pendapatan.

Menurut Elfindri (dalam Andra, 2011:16) menyatakan pendidikan dapat diinterpretasikan sebagai kepentingan peningkatan kualitas fisik dan non fisik. Secara hipotetik, hubungan ini akan menghasilkan perubahan prilaku, baik prilaku kesehatan, kesegaran jasmani, dan habitat lingkungan maupun prilaku bekerja. Pendidikan juga akan berkaitan dengan pendapatan individu. Akan tetapi dari segi lain, peningkatan pendidikan menghasilkan tingkat pendapatan, sekaligus akan membentuk pendapatan. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka lapangan pekerjaan untuk

mendapatkan pendapatan yang tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan.

Menurut Todaro (2003:411) dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai. Karena adanya hubungan ini, maka kebijakan pembangunan harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pendidikan secara bersama-sama.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya. Pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi dan sebaliknya pendidikan yang rendah akan memberikan pendapatan yang rendah pula.

3. Distribusi Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya dikonsumsi.

Jhingan (2003:31) menulis bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun yang digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

Menurut Partadireja (dalam Afdal, 2011:25) pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi atau penggunaan faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja dan skill yang dimilikinya. Penggunaan tanah diberi balas jasa yang disebut sewa, tenaga kerja diberi upah atau gaji, modal diberi uang dan skill yang diberi keuntungan.

b. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

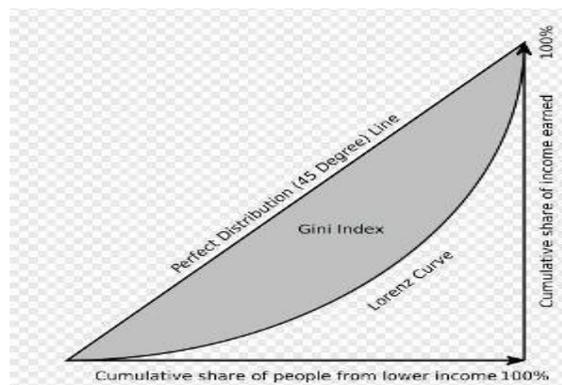
Menurut Todaro (2003:222) penerimaan pendapatan dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu :40% penduduk yang menerima paling rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan paling tinggi. Di Negara komunitas 40% dari seluruh pendapatan masyarakat di Negara maju digolongkan penduduk ini menerima kurang lebih sebesar 16% sedangkan Negara berkembang mereka hanya menerima yang lebih 12,5% dari keseluruhan pendapatan masyarakat.

Makin tinggi pendapatan perkapita suatu masyarakat makin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan tergantung pula pada corak distribusi pendapatan makin besar persentase penduduk yang

berpendapatannya dibawah garis kemiskinan. Menurut penelitian Micheal P.Todaro ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur sebagai berikut :

1) Kurva Lorenz

Menurut Todaro (2003:224) kurva lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.



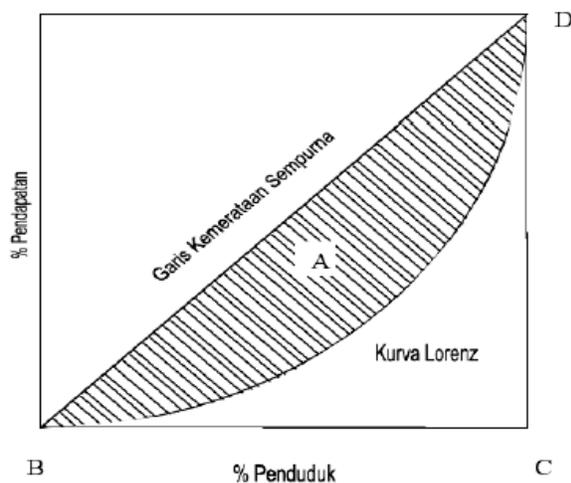
Gambar 1 : Kurva Lorenz

Sumber : Todaro, Michael.P.Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga 2003s

2) Koefesien Gini atau Gini Ratio

Menurut Todaro (2003:226) Koefesien Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan *agregat* (keseluruhan) yang angka berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefesien yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar anatar 0,50-0,70 sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relatif merata angkanya berkisar 0,20-0,35.

Indeks atau Gini Rasio adalah suatu koefesien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan pemerataan (ketimpangan) distribusi Pendapatan Nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefesiennya, maka semakin baik atau merata distribusi pendapatan. Dan sebaliknya semakin besar (semakin mendekati 1) koefesiennya, distribusi pendapatan semakin timpang.



Gambar 2 : interpretasi Koefesien Gini

Sumber : Todaro, Michael.P. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga* 2003

Gini Ratio diperoleh dengan membagi daerah yang dibentuk oleh kurva Lorenz bersama garis diagonal dengan cara segitiga yang terdapat dalam bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Seperti pada gambar 2, Gini Rasio merupakan rasio luas bidang yang X (luas bidang yang diarsir) terhadap luas segitiga BCD atau secara sistematis

Rumus :

$$\boxed{Gini\ Ratio = \frac{Luas\ Bidang\ X}{Segitiga\ ABC}} \dots\dots\dots 1$$

3) Kriteria Bank Dunia

Menurut Kuncoro (2006:139) kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

Jadi ada 3 kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yaitu : kurva Lorenz, Koefesien Gini da kriteria Bank Dunia.

Masalah ketimpangan pendapatan sebenarnya berkaitan erat dengan perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pemanfaatan faktor produksi tersebut akan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan perbedaan yang mencolok antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Golongan yang berpendapatan tinggi menguasai hampir seluruh faktor produksi dan tenaga kerja faktor penentu pembagian pendapatan.

c. Jenis Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Todaro (2004:221) para ekonomi membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk berbagai keperluan kajian kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima

masing-masing orang dan distribusi “fungsional” atau kepemilikan faktor-faktor produksi.

1) Distribusi Pendapatan Perorangan (*Personal Distribusi of Income*)

Ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara untuk mendapatkan penghasilan itu tidak dipermasalahkan. Dalam konsep ini tidak diperhitungkan dari mana pendapatan diperoleh dan berapa besarnya masing-masing individu atau rumah tangga yang menerima serta asalnya apakah dari bekerja atau penerimaan lain seperti bunga, hibah, laba dan warisan.

2) Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi Pendapatan Nasional Fungsional adalah distribusi yang menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal). Disamping memandang individu sebagai kesatuan terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional juga menyelidiki persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibanding dengan persentase pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

Dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan dikalangan penduduknya. Ukuran yang digunakan untuk distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Dimana

Distribusi pendapatan perorangan di ukur secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu sedangkan distribusi pendapatan fungsional merupakan distribusi yang menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi.

d. Metode Menghitung Pendapatan

Dilihat dari segi pendapatan nasional, maka pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang-barang jadi dalam jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun. Ada 3 metode dalam menghitung pendapatan :

1) Metode Pengeluaran

Menurut Sukirno (2002:31) pendapatan nasional yang dihitung dengan menghitung dan menaksir aliran belanja yang dilakukan rumah tangga, penanaman modal pemerintah dan luar negeri. Aliran belanja ini dinilai pengeluaran yang dilakukan terhadap barang-barang akhir dan jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan.

Menurut Deliarnov (2005:24) menggolongkan pengeluaran sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran Konsumsi, yaitu total semua pengeluaran rata-rata untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga
- 2) Pengeluaran perusahaan atau investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi
- 3) Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah pengeluaran yang bersifat konsumsi yang dilakukan pemerintah atas barang dan jasa.

4) Ekspor bersih adalah selisih ekspor dan impor.

Jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, maka Pendapatan Nasional diperoleh dengan menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ditambah dengan pengeluaran atas barang-barang impor atau selisih ekspor dan impor. Sehingga uraian di atas menyatakan bahwa dalam metode pengeluaran, pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi, non konsumsi dan tabungan.

2) Metode Pendapatan

Menurut Sukirno (2000:32) dalam metode pendapatan yang dihitung dan ditaksir adalah nilai pendapatan faktor-faktor produksi, yang berupa gaji dan upah, sewa dan bunga keuntungan perusahaan. Pendapatan dari faktor-faktor produksi yang penting adalah upah dan gaji. Jenis pendapatan ini merupakan imbalan kepada tenaga kerja dalam perekonomian baik tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja tidak terdidik.

Deliarnov (2000:25) menggolongkan pendapatan atas 2 yaitu : pendapatan pribadi dan pendapatan disposibel. Pendapatan pribadi adalah pendapatan pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota baik dari hasil kerja, beasiswa, pembayaran pensiun dan sebagainya.

3) Metode Produksi Nilai Tambah

Menurut Sukirno (2000:3) dalam menghitung Pendapatan Nasional dengan cara menghitung produksi dan nilai tambah yaitu dengan

menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan metode ini dalam perhitungan pendapatan nasional mempunyai 2 tujuan penting yaitu :

- a. Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor didalam mewujudkan Pendapatan Nasional.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan cara menghitung nilai produksi netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

Menurut Todaro (2003:235) masalah pemerataan pendapatan akan tetap ada selama proses pembangunan berlangsung, sebenarnya secara absolut pendapatan dan golongan yang berpendapatan rendah tidak menurun, bahkan akan naik. Akan tetapi karena pendapatan golongan yang berpendapatan tinggi sangat meningkat, maka ketimpangan pembagian pendapatan menjadi mencolok. Kemampuan golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Bila tidak demikian, disparitas pendapatan antar golongan berpendapatan rendah dan tinggi akan semakin besar. Ada beberapa kenyataan bahwa pendapatan masyarakat kelompok menengah dan atas mempunyai kenaikan lebih cepat dan kelompok miskin melalui tahap-tahap pembangunan.

Menurut Mankiw (2003:570) bagi Negara berkembang umumnya termasuk Indonesia menghadapi dilema dalam perekonomian yaitu

menyangkut pilihan dan prioritas yang diinginkan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak selalu semata-mata diukur berdasarkan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita saja. Kita harus memperhatikan sejauhmana distribusi pendapatan telah menyebar kesegenap penduduk lapisan masyarakat, serta siapa saja yang telah menikmati pembangunan tersebut.

Menurut Dumairy (1996:53) Distribusi Pendapatan Nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai ketidakmerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi yang dimaksud. Tiga diantaranya yang paling lazim digunakan adalah Kurva Lorenz dan Indek atau Rasio Gini.

B. Penelitian Terdahulu

Bustanul Afdal (2011:54) yang penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Agam” dimana variabel bebasnya yaitu Ketimpangan Pendidikan (X1), dan variabel terikatnya Ketimpangan Pendapatan (Y) menyatakan bahwa ketimpangan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi ketimpangan pendidikan, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatannya.

Hendra Ridho G Siregar (2005) yang penelitiannya berjudul “ Analisis Pengaruh Komuter terhadap pengembangan wilayah di kecamatan Medan Tembung “ dimana variabel terikat yaitu pendapatan (Y) dan variabel bebasnya yaitu lama bekerja (X1), waktu tempuh (X2) dan pendidikan (X3). Dari hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan dan variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dengan signifikan yang cukup tinggi.

Ma'mun Musfidar (2012) yang penelitiannya berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan” dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Populasi penduduk dan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Sulawesi Selatan menunjukkan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi. Sedang Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan.

Muhammad Ja'far Bustomi (2012) yang penelitiannya berjudul “Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota Dan Implikasinya di Provinsi Jawa Tengah” dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa perhitungan indeks gini pendidikan di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori ketimpangan pendidikan rendah (0,309), dengan penyumbang ketimpangan pendidikan adalah ketimpangan pendidikan pada wilayah kabupaten-kota. Pada model regresi pertama

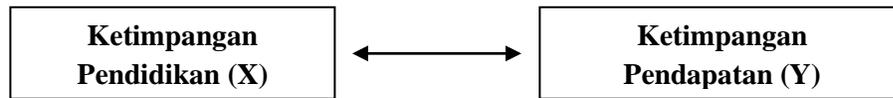
diketahui bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah atas pendidikan, dan angka harapan hidup berpengaruh negatif pada ketimpangan pendidikan secara signifikan. Sedangkan variabel gender gap berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendidikan. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan adalah variabel ketimpangan pendapatan. Pada model regresi kedua diketahui bahwa ketimpangan pendidikan mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukan persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah.

Ketimpangan Pendidikan (X) dan Ketimpangan Pendapatan (Y) mempunyai hubungan timbal balik di kabupaten/ kota di Sumatera Barat. jika semakin tinggi pendidikan maka akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan, jika semakin tinggi pendapatan maka biaya untuk pendidikan juga akan meningkat sehingga pendidikan juga akan meningkat. Oleh karena itu ketimpangan pendidikan di kabupaten/ kota Propinsi Sumatera Barat akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan diantara masyarakat dan sebaliknya ketimpangan pendapatan juga akan mempengaruhi ketimpangan pendidikan diantara

masyarakat kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Maka dapat dibuat kerangka konseptual.



Gambar 3
Kerangka Konseptual Kausalitas Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat

D. Hipotesis

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Sesuai dengan rumusan dan kajian teori, maka rumusan hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan timbal balik ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Terdapat hubungan timbal balik antara ketimpangan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

$H_0 : \sigma = 0$

$H_a : \sigma \neq 0$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada Bab IV tentang Kausalitas ketimpangan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Melalui uji kointegrasi dengan *Johansen's Cointegration Test* menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian yaitu ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan dalam setiap periode jangka pendek cenderung saling menyesuaikan untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya. Yaitu nilai *Trace statistik* lebih besar dibandingkan nilai *Critical Value* yakni $33,97152 > 15,49471$ dengan nilai probabilitas yaitu 0,0000.
2. ketimpangan pendidikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Karena $F_{\text{statistik}}$ yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} yakni $5,44999 > 3,165$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,0178 pada $\alpha = 0,05$ akibatnya H_0 ditolak dan H_a diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Dan Ketimpangan Pendapatan tidak mempengaruhi Ketimpangan Pendidikan, karena $F_{\text{statistik}}$ yang diperoleh lebih kecil

dibanding F_{tabel} yakni $1,63224 < 3,165$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,2306 pada $\alpha = 5\%$, akibatnya H_0 diterima dan H_a ditolak, bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

B. Saran

Dengan terbuktinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat, maka penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah kabupaten/ kota di Sumatera Barat agar adanya pemerataan pendidikan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi serta mengefektifkan program pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), program sekolah gratis, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) dan lain-lain sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka produktifitas kerja penduduk juga meningkat sehingga pendapatan yang akan diterima juga meningkat. Dan dengan sendirinya ketimpangan pendidikan akan menurun sehingga ketimpangan pendapatan di kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija R. Scochrul, Sari W Dyiah. 2011. *Eviews*. Salemba Empat : Jakarta.
- Akhirmen. 2005. *Statistika I*. FE UNP: Padang.
- Afdal, Bustanul. 2011. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Agam*. Skripsi. FE UNP: Padang. (tidak dipublikasikan).
- Atmanti, HastariniDwi. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan*. <http://eprints.undip.ac.id> :diunduh pada tanggal 4 Oktober 2012.
- BPS Sumatera Barat. 2009. *Sumatera Barat Dalam Angka*.
- _____. 2010. *Sumatera Barat Dalam Angka*.
- _____. 2011. *Sumatera Barat Dalam Angka*.
- Danim, Sudarman, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia : Bandung.
- Devi Retnosari. 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Skripsi. FE IPB : Bogor.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Salemba Erlangga: Jakarta.